

BUKAN SEKEDAR SUBSIDI PULSA, UNTUK MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH DAMPAK PANDEMI COVID-19

Teguh Triwiyanto

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur
E-mail: teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id

Abstrak: Subsidi pulsa bagi guru dan siswa mulai digulirkan September 2020 untuk dukung pembelajaran jarak jauh, akibat pandemi covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Sayangnya pemerintah mengabaikan potensi terjadinya putus sekolah, persoalan yang lebih mendasar dan tidak terselesaikan di Indonesia sejak 31 tahun yang lalu, sementara orde terus berganti. Kertas kerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran, bahwa bukan sekedar subsidi pulsa, untuk mengurangi angka putus sekolah dampak pandemi covid-19. Data digali melalui berbagai hasil publikasi ilmiah terkait pandemi. Hasilnya secara terperinci di dalam artikel ini, disertai dengan pembahasan subsidi pulsa dan berbagai kebijakan tanggap covid-19 dan manajemen pendidikan untuk mengurangi dampak covid-19 terhadap angka putus sekolah.

Kata kunci: angka putus sekolah, dampak pandemi covid-19

Sejarah yang terlupakan, ada pandemi influenza tahun 1918 di Hindia Belanda (Indonesia – kala itu), tidak tercatat angka putus sekolah dengan pasti, tetapi kondisinya mirip dengan saat ini, pandemi covid-19 mulai memasuki bulan ke-7 sejak bulan Maret 2020. Wibowo, et al. (2009) mencatat pada tahun itu, setelah Perang Dunia Pertama berakhir, terjadi wabah penyakit influenza di seluruh dunia. Kesaksian Wedono di Bandongan, sebelah Barat Kali Progo, di kaki Gunung Sumbing. Jarak Bandongan Magelang tiga setengah kilometer, ditempuh dengan berjalan kaki. Pukul 09.00 atau pukul 09.30 pulang lagi karena sekolah kosong. Mengingat wabah influenza yang terus menghantui Kota Magelang, maka saya dan adik saya pindah dari rumah nenek ke rumah Eyang Mantri, Guru Jawa dari Jambon ke Bayeman. Saya pindah ke situ sampai tahun 1923, kemudian pindah ke Yogyakarta, masuk ke sekolah AMS (Algemeene Middelbare School) bagian B. Gates (2020) menyatakan sejauh ini data menunjukkan bahwa virus covid-19 memiliki risiko kematian kasus sekitar 1%; angka ini akan membuatnya berkali-kali lipat lebih parah daripada influenza musiman biasa, menempatkannya di antara pandemi influenza 1957 (0,6%) dan pandemi influenza 1918 (2%), keparahannya menyaingi epidemi influenza satu abad yang lalu.

Dalam situasi normal selalu ada anak putus sekolah dengan berbagai sebab, terutama kesulitan ekonomi, pemerintah Indonesia pada saat itu sadar dan memberikan bantuan siswa miskin, kompensasi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terjadi pada 22 Juni 2013. Suprastowo (2014) menyatakan terdapat kontribusi bantuan siswa miskin terhadap keberlangsungan sekolah yang terkait dengan angka putus sekolah. Di Indonesia jumlah anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2017 sebanyak 2.603.079 anak. Jumlah tersebut tidak bergeser jauh dari 31 tahun lalu, penelitian Nielsen (1998) menyatakan Indonesia di tahun 1989 masih terdapat 30% anak putus sekolah di dalam perjalanannya untuk menamatkan pendidikan dasar.

Saat situasi yang tidak normal seperti serkarang, kemungkinan besar angka putus sekolah meningkat, alih-alih memberikan bantuan siswa miskin, bantuan berupa subsidi pulsa dijadikan kebijakan. Padahal seperti yang disampaikan Nicola et al. (2020) covid-19 berdampak pada angka putus sekolah. Covid-19 telah memengaruhi semua tingkat sistem pendidikan, dari pra-sekolah hingga pendidikan tinggi. Berbagai negara telah memperkenalkan berbagai kebijakan, mulai dari pembatasan untuk jam operasional sekolah

hingga penutupan total. Lebih dari 100 negara telah memberlakukan penutupan fasilitas pendidikan secara nasional. UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) memperkirakan bahwa hampir 290 juta siswa di dunia telah terpengaruh oleh penutupan lembaga pendidikan. Efek pandemi, di Amerika Serikat, menurut Dorn et al. (2020) selain kerugian belajar, penutupan sekolah meningkatkan angka putus sekolah (saat ini 6,5 persen untuk Hispanik, 5,5 persen untuk siswa kulit hitam, dan 3,9 persen untuk siswa kulit putih).

World Health Organization (WHO) yang menyatakan wabah covid-19 sebagai darurat global pada 30 Januari 2020. Azevedo et al. (2020) dengan menggunakan data dari 157 negara, menemukan bahwa hampir 7 juta siswa dari pendidikan dasar hingga menengah dapat putus sekolah karena guncangan pendapatan dari pandemi. Aucejo et al. (2020) menyatakan karena covid-19: 13% siswa menunda kelulusan, 40% kehilangan pekerjaan, magang, atau tawaran pekerjaan, dan 29% berharap mendapatkan lebih sedikit pada usia 35. Selain itu, efek ini sangat heterogen. Seperempat siswa meningkatkan waktu belajar mereka lebih dari 4 jam per minggu karena covid-19, sementara seperempat lainnya mengurangi waktu belajar mereka lebih dari 5 jam per minggu. Lembaga amal Save the Children (*Save Our Education: Protect Every Child's Right to Learn in the COVID-19 Response and Recovery*, 2020) menyatakan telah terjadi darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jutaan anak yang terkena dampak penutupan sekolah dan berisiko putus sekolah secara permanen.

Di Indonesia, penutupan sekolah dilakukan pada 16 Maret 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, kemudian dilakukan pembelajaran secara daring. Terdapat berbagai hambatan pembelajaran secara daring, di satu sisi, pemerintah belum banyak bertindak untuk siswa yang terputus dari pendidikan sekolah sama sekali, karena penutupan sekolah, yang potensial meningkatkan angka putus sekolah, di sisi lainnya. Pemerintah lebih memilih kebijakan dan mendorongnya pada upaya pembelajaran daring melalui subsidi pulsa.

Terdapat kesulitan dalam pembelajaran daring ini, dampak penutupan akses ke sekolah, hampir dialami oleh semua negara di dunia. UNESCO (2020) mencatat, lebih dari 1,5 miliar siswa di 165 negara terpengaruh oleh penutupan sekolah karena covid-19. Hampir 260 juta anak-anak tidak punya akses ke sekolah. Di banyak negara masih ada kesenjangan, segregasi dan diskriminasi, dan situasi diperburuk oleh pandemi corona. Sementara anak-anak dari keluarga dengan sarana yang baik dapat melanjutkan sekolah dari rumah menggunakan laptop, ponsel dan internet, jutaan anak lainnya terputus dari pendidikan sekolah sama sekali.

Tujuan kertas kerja ini untuk menggambarkan bahwa bukan sekedar subsidi pulsa, untuk mengurangi angka putus sekolah dampak pandemi covid-19. Untuk tujuan tersebut di bahas mengenai (1) Subsidi pulsa dan berbagai kebijakan tanggap covid-19; dan (2) Manajemen pendidikan untuk mengurangi dampak covid-19 terhadap angka putus sekolah.

SUBSIDI PULSA DAN BERBAGAI KEBIJAKAN TANGGAP COVID-19

Tampaknya Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia ini yang memberikan subsidi pulsa, dengan maksud untuk memperluas akses pembelajaran dalam jaringan. Berbagai kebijakan dalam pendidikan, selain subsidi pulsa untuk mengurangi dampak covid-19, dilakukan oleh negara Inggris dalam hal kesehatan mental (Pfefferbaum & North, 2020), Amerika Serikat memberi makan anak berpenghasilan rendah (Dunn et al., 2020), dan Swedia memberikan peningkatan hibah untuk pendidikan orang dewasa, tindakan dukungan untuk guru, pemimpin sekolah dan penyelenggara sekolah, dan menjangkau siswa berkebutuhan khusus (*Swedish actions on education in response to the corona pandemic*, 2020). Dalam kasus penutupan sekolah, UNICEF (2020) per Maret 2020 menekankan untuk

dukung terus akses ke kualitas pendidikan. ini bisa termasuk: penggunaan strategi online/e-learning, menugaskan membaca dan latihan untuk penelaahan di rumah, siaran radio, podcast, atau televisi dengan konten akademis, menugaskan guru untuk melakukan tindak lanjut harian atau mingguan jarak jauh dengan siswa, dan tinjau/kembangkan strategi pendidikan akselerasi.

Setelah Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) direvisi, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa digunakan untuk beli pulsa internet guru dan siswa, lalu sekarang subsidi pulsa. Masalah kuota internet kerap menjadi keluhan selama pembelajaran daring. Pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen, anggarannya mencapai sekitar Rp 8,9 Triliun.

Tampaknya pesan UNICEF dijadikan landasan melakukan subsidi pulsa, sayangnya kebijakan tersebut tidak berpijak pada realitas penggunaan internet oleh warga Indonesia sebelum pandemi, terutama oleh siswa dan guru, karena sebagian besar sekolah belum menggunakan platform digital dan alat digital sebelum pandemi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2019) menyatakan tahun 2019 dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen. Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat. Jumlah smartphone yang terjual tiap tahun di pasaran Tanah Air pun mencapai jutaan unit. Namun, hal tersebut ternyata belum diimbangi oleh kecepatan internet seluler (mobile) yang tinggi pula. Data dari *Speedtest Global Index – Monthly Comparisons of Internet Speeds from around the World* (2020) yang mencatat rata-rata kecepatan internet seluler di Asia Tenggara mencapai 21,82 Mbps. Internet seluler Indonesia paling lambat di Asia Tenggara.

Tanpa mengabaikan lambatnya akses internet, kondisi yang kontradiktif yaitu publikasi dari Cambridge Assesment International Education (Bernstein, 2019) menyebutkan siswa Indonesia adalah yang tertinggi secara global dalam penggunaan ruang komputer (40%). Mereka juga menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia dalam penggunaan komputer desktop (54%), setelah Amerika Serikat. Di samping itu, lebih dari dua pertiga siswa Indonesia (67%) menggunakan ponsel pintar di kelas, dan bahkan lebih banyak menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah (81%).

Berbagai kebijakan tanggap covid-19 di lakukan oleh pemerintah di banyak negara. Salah satunya kebijakan yang banyak dilakukan yaitu pembelajaran jarak jauh. Keberhasilan strategi pembelajaran jarak jauh tergantung pada infrastruktur yang tersedia dan keakraban guru dengan alat pembelajaran jarak jauh. Implementasi yang efektif dan adil sangat bergantung pada aspek-aspek ini. Misalnya saja China, dengan kekokohan struktur konektivitas, telah berhasil menawarkan jarak belajar, negara dengan jangkauan internet rendah, telepon seluler atau televisi, seperti Vietnam dan Mongolia, sedang menghadapi kesulitan untuk maju dalam agenda ini.

Di Brazil dilakukan penggantian kelas tatap muka berdasarkan jarak pembelajaran, karena sulitnya mengatasi ketidaksetaraan akses ke online sebagai alat belajar. Selain status sosial ekonomi keluarga, aspek lain yang tidak setara seperti perbedaan di konektivitas internet antar wilayah, dan antar rumah tangga di pedesaan dan perkotaan menjadi pertimbangan, perbedaan juga terjadi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Situasi ini mirip dengan di Indonesia.

Keterampilan dan pengalaman guru dan manajer dalam penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh merupakan faktor penting. Guru di Spanyol, misalnya, diminta untuk menyiapkan konten dan menawarkan kelas online. Di Singapura, pelatihan diberikan kepada

para guru tentang strategi pendidikan hingga pengajaran online. Kesulitannya di Indonesia, Kurniasari et al. (2018) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang tua, masih percaya bahwa pendidikan formal di dalam kelas merupakan satu-satunya jaminan untuk memperoleh pekerjaan.

Pilihan kebijakan beragam, urgensi yang dibebankan oleh tantangan menyebar dengan cepat karena covid-19, menjadikannya penting untuk mengamati solusi dan strategi jangka pendek yang telah diterapkan oleh jaringan pendidikan di seluruh dunia. World Bank (2020) menyatakan tindakan cepat yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dapat melalui empat aspek: (1) Aspek konten pendidikan berupa: inventarisasi sumber daya online yang dapat digunakan dalam pembelajaran, konten untuk guru dan siswa, dengan mempertimbangkan bahasa yang sesuai dan tingkat konektivitas; (2) Aspek infrastruktur, yaitu: penggunaan media lain seperti radio dan televisi, pengembangan website dengan konten gratis yang bisa diakses secara offline (setelah informasi diunduh), penyediaan jalur akses internet di tempat umum seperti alun-alun, taman, sekolah, dan tempat parkir; (3) Aspek guru, yaitu: pembuatan grup pendidikan di aplikasi perpesanan, di mana guru dan siswa yang sama menyiapkan konten dan strategi bersama, penciptaan saluran kontak langsung dengan guru untuk pertanyaan tentang penggunaan alat pembelajaran jarak jauh, pemantauan kegiatan yang dilakukan; dan (4) Aspek keterlibatan orang tua atau wali, yaitu: produksi bahan ajar dengan detail instruksi tentang bagaimana melakukan setiap aktivitas, dukungan untuk orang tua atau wali agar bisa berkembang rutinitas belajar dengan anak-anak mereka, dukungan emosional dan psikologis kepada orang tua, wali dan anak-anak, dan menggunakan pesan teks dan semacamnya untuk menjaga kontak dekat dengan orang tua.

Manajemen Pendidikan Untuk Mengurangi Dampak Covid-19 Terhadap Angka Putus Sekolah

Memang belum ada angka putus sekolah yang keluar sebagai dampak covid-19 sampai saat ini. Tapi, untuk diingat kembali bahwa rata-rata setiap tahunnya, selama 31 tahun terakhir ini, masih terdapat 30% anak putus sekolah di dalam perjalanannya untuk menamatkan pendidikan dasar. Kesusulitan yang menerpa sektor sosial dan ekonomi, mendorong peningkatan angka putus sekolah, seperti yang dikatakan Ouma et al. (2017) bahwa faktor sosial-ekonomi berkontribusi pada anak putus sekolah.

Masih terdapatnya 30% anak putus sekolah yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar tersebut memeperlihatkan masih lemahnya manajemen pendidikan untuk mendorong bebasnya generasi penerus dari belenggu kebodohan. Negara tidak bisa mengatasi persoalan putus sekolah, dukungan pembiayaan yang digelontorkan untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun belum berhasil dengan baik. Wajib belajar ini sudah ada sejak tahun 1950 (saat itu 6 tahun) melalui Pasal 30 UUDS RI yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 dinyatakan bahwa provinsi mempunyai wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Saat ini, bantuan operasional sekolah yang setiap tahun sebesar 50 triliun kurang efektif dan efisien menjangkau anak-anak supaya tidak putus sekolah. Longgarnya bantuan operasional sekolah, dapat digunakan untuk menangani latar belakang putus sekolah yang bermacam-macam sebabnya.

Paling utama penyebab putus sekolah yaitu krisis ekonomi yang membelit keluarga, mendorong anak tidak melanjutkan sekolah. Saepuloh & Suherman (2019) menyatakan penyebab putus sekolah yaitu: ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya dalam melanjutkan pendidikan, dan kurang meratanya pendataan dari pemerintah setempat dalam merespon program pendidikan sehingga masih

banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan program tersebut. Hasil penelitian Dewi et al. (2014) menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Faktor tersebut yaitu ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya, dan lokasi sekolah. Faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan, artinya bahwa perhatian orang tua mampu menjelaskan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Aristin (2016) menyatakan faktor-faktor putus sekolah yaitu karena jarak tempat tinggal dengan sekolah, jenis pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan.

Putus sekolah selain dipengaruhi oleh faktor keluarga dan ekonomi, juga dipengaruhi oleh psikologi siswa bersangkutan. Riyadiningsih & Astuti (2013) menyatakan ketika seorang siswa memiliki kondisi psikologis yang baik, yaitu dilihat dari *self concept*, *internal locus of control*, dan nilai diri (*self value*) yang baik, maka kendala seperti demografi, geografi, sosial ekonomi, dan budaya bukan suatu krisis serius, tetapi sebagai sebuah tantangan. Kondisi psikologis ini mendorong seorang individu untuk memberdayakan semua potensi yang ada untuk mengatasi kendala tersebut. Ketika seorang individu siswa memutuskan apakah hendak keluar dari sekolah ataukah tidak, tentunya dilandasi adanya suatu krisis rumit (demografi ataupun geografi), yang membutuhkan suatu perjuangan. Perjuangan tersebut berhasil dan membuahkan keputusan terbaik (tidak keluar sekolah) ketika individu siswa tersebut memiliki keyakinan positif terhadap dirinya sendiri. Keyakinan tersebut berupa keyakinan dirinya terhadap kemampuan dalam mengatasi dan menyelesaikan krisis, keyakinan bahwa nasib sendiri berada ditangan sendiri, keyakinan bahwa kehidupan sejatinya adalah belajar dan belajar, serta keyakinan bahwa nilai diri sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan seorang individu.

Masih tingginya angka putus sekolah pada pendidikan dasar, ternyata diikuti pada usia di atasnya, 15 – 24 tahun yang masih buta huruf. Buta huruf mencirikan orang-orang yang, meskipun berpendidikan formal, tidak memiliki keterampilan membaca dan menulis dasar untuk menangani kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai pusat sistem, kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi krisis tidak sedikit, misalnya buta huruf yang masih saja terdapat pada usia muda, generasi penerus bangsa.

Angka putus sekolah dan buta huruf memberikan petunjuk bahwa ada krisis produktifitas pada generasi penerus bangsa. Anak Indonesia yang lahir saat ini 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya, demikian hasil *World Development Report 2019* dari World Bank (2019), yang menempatkan peringkat human capital index Indonesia 87 dari 157 negara yang disurvei. Peringkat pertama Singapura dengan skor 0,88, diikuti negara dari Asia tenggara, posisinya lebih baik dari Indonesia (0,53) berturut-turut peringkat 48 Vietnam (0,67), peringkat 55 Malaysia (0,67), peringkat 65 Thailand (0,60), dan peringkat 84 Filipina (0,55). Indikator yang diukur yaitu harapan hidup, sekolah, dan kesehatan.

Pendidikan yang baik – minim putus sekolah dan buta huruf – menunjukkan pentingnya manusia sebagai pusat sistem pembangunan, Sahban (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa – bukan modal fisik atau sumber daya material – merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan.

Wajah pembangunan pendidikan Indonesia dapat dibentangkan dengan melihat tujuan pendidikan nasional. Secara umum tujuan pendidikan nasional mencakup: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mengembangkan konsep manusia seutuhnya, (3) konsep manusia yang bermoral religius, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, cakap, sehat dan sadar sebagai warga bangsa.

Selain keberhasilan dan kegagalan manajemen pendidikan pada aspek individual siswa sebagai pusat manajemen pendidikan, secara institusional, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk terus melakukan upaya perbaikan mutu, melalui akreditasi. Hasil akreditasi, data dari Badan Pusat Statistik (2015), menunjukkan masih banyak banyak sekolah dengan status Tanpa Akreditasi (TT). Artinya, masih ada sekolah (1,42%) yang belum bisa memberikan standar pelayanan nasional atau standar pelayanan minimal, angka tersebut semakin bertambah jika peringkat akreditasi C dimasukkan di dalamnya (15,46%). Secara berturut-turut jenjang pendidikan yang statusnya Tanpa Akreditasi (TT) yaitu SD (64,78% atau 1535 sekolah), SMP (14,10% atau 298 sekolah), MI (7,81% atau 137 sekolah), MTs (6,53% atau 87 sekolah), SMA (3,81% atau 97 sekolah), dan MA (2,94% atau 64 sekolah). Sekolah dengan status Tanpa Akreditasi (TT) di bawah Kemendikbud jumlahnya relatif lebih sedikit (288 sekolah) dibandingkan sekolah yang berada di bawah Kemendikbud (1930 sekolah).

Di tingkat dasar sampai menengah hampir semua sekolah yang terakreditasi memiliki titik lemah pada standar kelulusan, sarana dan prasarana, dan pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Untuk memperbaiki standar kelulusan, peran sekolah lebih dominan, sehingga upaya untuk meningkatkannya dengan memperbaiki manajemen pada level sekolah. Sementara dua standar yang lain, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mendorong terpenuhinya standar tersebut, tentu saja partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan. Standardisasi melalui akreditasi sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga mutu pendidikan.

Tujuan akreditasi sekolah yaitu untuk memperoleh gambaran umum dan detail tentang kinerja sekolah, baik aspek kelebihan maupun aspek kekurangannya. Selain itu, akreditasi sekolah juga bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Sedangkan fungsi akreditasi sekolah adalah sebagai berikut: (1) Sebagai bahan pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dan berpedoman pada standar-standar atau baku mutu sekolah; (2) Sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap kinerjanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*); sebab, bagaimanapun juga, sekolah didirikan dan diselenggarakan adalah dalam rangka memenuhi keinginan dan memenuhi harapan masyarakat; dan (3) Sebagai titik tolak untuk pengembangan. Hal ini sangat penting, karena berdasarkan hasil pemahaman diri, koreksi diri dan berbagai masukan yang diberikan oleh pihak eksternal, sekolah punya kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Terdapat sejumlah kendala yang menjadikan sampai sekarang masih saja banyak sekolah dengan status Tanpa Akreditasi (TT). Kendala-kendala tersebut yaitu: (1) Akreditasi sekolah kurang memahami kondisi obyektif sekolah tentang kelayakan keberadaan sekolah beserta dengan realitas kinerjanya; (2) Kurang efektifnya pemahaman terhadap kondisi atau kelayakan sekolah beserta dengan kinerjanya untuk dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan berbagai keputusan penting tentang sekolah tersebut; (3) Dilakukan kurang komprehensif atau menyeluruh, yang berarti aspek-aspek yang diakreditasi adalah keseluruhan aspek sekolah dinilai kurang optimal; (4) Akreditasi kurang memberdayakan, yang berarti bahwa akreditasi sekolah tersebut kurang mendorong kelayakannya akan dapat ditingkatkan dan tingkat kinerjanya juga makin bagus; (5) Lemahnya kemandirian sekolah, seharusnya makin punya kesadaran diri dan sekaligus punya kemandirian untuk secara terus menerus melakukan evaluasi diri, melakukan peningkatan kinerja dan pelayanan berdasarkan atas hasil evaluasi diri; dan (6) Kesiapan sekolah yang

lemah, yang berarti bahwa sekolah-sekolah yang diakreditasi, memang didasarkan atas kesiapan mereka untuk dilihat dan di-*review* oleh pihak lain atau eksternal.

Selain kesiapan sekolah, aspek pelaksana akreditasi juga masih menghadapi kendala tidak sedikit. Kendala tersebut antara lain: (1) Lemahnya Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi, merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi, melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi; (2) Kurang optimalnya kinerja Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Sekolah/Madrasah dalam: melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan, merencanakan program akreditasi yang menjadi sasaran akreditasi, mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, menetapkan hasil peringkat akreditasi, mengelola sistem basis data akreditasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi; dan (3) Lemahnya kinerja Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) kabupaten/kota, sebagai penghubung antara (BAP) sekolah/madrasah dengan dinas pendidikan dan Kemenag dalam hal: mengusulkan jumlah sekolah yang akan diakreditasi, mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kab/kota yang bersangkutan, menyusun data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kab/kota, mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor, mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor, dan menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor.

Selain akreditasi, kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup komponen standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Pencapaian berbagai standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan.

Mutu layanan pendidikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah memang berat. Kalau memang data yang ditampilkan oleh pemerintah benar, maka lebih dari 20 persen sekolah disemua jenjang belum memenuhi standar pendidikan minimal. Artinya, masih banyak sekolah yang harus diperbaiki mutu layanannya. Padahal beban tersebut harus ditambah dengan sekolah yang masih berada di standar minimal, yang tentu saja kurang optimal mutu layanannya.

Krisis manajemen pendidikan selanjutnya yaitu pada kepala sekolah dan guru, layak mengajar yang berijazah S1 atau Diploma 4 dan lebih tinggi. Kepala sekolah dan guru mustinya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sayangnya 30% lebih kepala sekolah dan guru tidak layak mengajar. Secara nasional kepala sekolah SD sebesar 147.536 orang, yang layak sebesar 131.431 orang, perempuan sebesar 58.803 orang, tetap sebesar 147.536 orang, dan PNS sebesar 138.857 orang, dan pensiun 33.777 orang. Data Badan Pusat Statistik (2016), pada tahun 2016 secara nasional, persentase guru layak mengajar SD sebesar 80,33% (1.323.918 dari jumlah total 1.648.077) dengan terbesar terjadi di Jawa Timur sebesar 89,21% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 45,66%. Persentase guru layak mengajar perempuan SD sebesar 65,12% berarti sudah lebih banyak perempuan yang menjadi guru, dengan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 79,92% dan terkecil di Papua sebesar 50,53%. Persentase guru tetap SD sebesar 67,20% dengan terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 82,85% dan terkecil terjadi di Sulawesi Barat sebesar 56,28%. Persentase guru PNS SD sebesar 60,19% dengan rincian terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 79,55% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 43,94%.

Persentase guru pensiun SD sebesar 10,37% dengan rincian terbesar terjadi di Provinsi Yogyakarta sebesar 14,55% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 4,09%.

Secara nasional persentase kepala sekolah dan guru layak mengajar (KSGL) SD sebesar 81,05%, terbanyak di Provinsi Jawa Tengah 89,93% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 46,62%. Persentase kepala sekolah dan guru layak mengajar perempuan (KSGP) SD sebesar 63,04% menunjukkan belum ada kesetaraan dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 78,72% yang berarti sudah lebih banyak perempuan dan terkecil di Papua sebesar 46,48%. Kepala sekolah dan guru layak mengajar tetap (KSGT) SD sebesar 69,89% berarti masih terdapat 30,11% guru dengan status tidak tetap dan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 83,74% dan terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 59,09%. Persentase kepala sekolah dan guru layak mengajar PNS (KSGPNS) SD sebesar 62,98% dan terbesar di Provinsi Maluku sebesar 81,33% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 45,61%. Persentase kepala sekolah dan guru layak mengajar pension (KSPen) SD sebesar 11,40% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 15,34% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 4,74%. Disparitas paling besar pada kepala sekolah dan guru layak SD sebesar 43,32% dan paling kecil pada kepala sekolah dan guru SD pensiun sebesar 10,61%.

Persebaran mutu kepala sekolah dan guru layak mengajar yang berijazah S1 atau Diploma 4 dan lebih tinggi masih belum merata, sebanyak 20 provinsi masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan masih ada di bawah 50% di bawah rata-rata nasional. Manajemen kepala sekolah dan guru belum menunjukkan kinerja yang baik, dari pengadaan atau perekrutan (*recruitment*), pengembangan (*development*), pembayaran (*compensation*), dan pemutusan hubungan kerja (*separation*).

Diketahui bahwa berdasarkan sekolah, dapat dihitung kebutuhan kepala sekolah. Dari data BPS tahun 2016 memperlihatkan bahwa ternyata semua jenjang pendidikan tidak memerlukan tambahan kepala sekolah. Namun, dari kelas yang ada terjadi kekurangan guru di SLB sebesar 3.596 orang dan ditambah dengan kurikulum maka kekurangan guru SMA dan SMK masing-masing sebesar 160.661 dan 108.249 orang. Sebaliknya, SD dan SMP telah kelebihan guru masing-masing sebesar 90.618 dan 34.901 orang. Secara keseluruhan, dikdasmen masih kekurangan 146,987 guru. Kekurangan dan kelebihan guru juga bisa dilihat dari R- S/G, terlihat SD dan SMP kelebihan guru. Sebaliknya, SLB, SMA, dan SMK kekurangan guru. Ketika menggunakan rasio siswa per guru hanya diketahui kurang atau lebih namun tidak diketahui kuantitasnya.

Kondisi sekolah menurut jenjang pendidikan memperlihatkan jangkauan manajemen pendidikan yang luas dan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Manajemen pendidikan adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber-sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat nonmanusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Hampir semua jenjang pendidikan, kecuali SD, mengalami kekurangan gedung sekolah, kelas, siswa, kepala sekolah, dan guru. Tampak misi dan kebijakan yang lahir dari pemerintah mengandung titik lemah pada pengelolaan dan layanan pendidikan nasional. Misi dan kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa sampai hari ini layanan pendidikan yang minim tersedia, jangkauan layanan pendidikan yang kurang merata, belum terwujudnya kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan jaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang baik. Layanan pendidikan ini sangat jauh berbeda kondisinya di tahun 1950-an, di mana menurut Subkhan (2018) jumlah SD sebanyak 23.801, jumlah siswa 4.926.370, dan jumlah guru 38.850 untuk melayani jumlah penduduk Indonesia yang pada waktu itu 77, 2 juta jiwa.

Kondisi awal-awal kemerdekaan, sampai saat ini, secara kuantitatif memang banyak kemajuan pada aspek manajemen pendidikan Indonesia, jumlah rakyat dan wilayah yang luas

menuntut sumber daya pengelola banyak, kompleks, dan biaya yang tidak sedikit. Secara kualitatif, capaian manajemen pendidikan Indonesia belum memuaskan, untuk sebuah perjalanan pembangunan pendidikan yang cukup panjang. Ukuran waktu ini, dapat dibandingkan misalnya dengan banyak negara yang memulai pembangunan pendidikan hampir bersamaan waktunya dengan Indonesia. Mereka melakukan pembangunan pendidikan di sisa-sisa perang dunia kedua, dengan manajemen yang baik, hasilnya mulai dirasakan sekarang. Manajemen pendidikan yang melakukan berbagai reformasi atas krisis terjadi disekolah-sekolah di Indonesia belum banyak berbuah positif untuk mendorong kemajuan bangsa.

Sekolah adalah organisasi, bahwa reformasi sekolah gagal sebagian besar karena usaha reformasi dipaksakan daripada sistemik, reformasi seluruh organisasi, pertama-tama dilakukan nustinya meninjau beberapa cara berpikir tentang organisasi dan tentang perilaku dalam organisasi. Memahami organisasi sekolah dilakukan melalui kelompok inti organisasi, organisasi pembelajaran, sistem latihan, peran dalam organisasi, tanggung jawab, arsitektur organisasi, dan tanggap terhadap realitas untuk melakukan reformasi.

Reformasi manajemen pendidikan di Indonesia menjadi mendesak dilakukan, organisasi sekolah perlu didorong untuk melakukan perbaikan. Nilai dan institusi yang tidak banyak mendorong kebaikan untuk manajemen pendidikan perlu di tata ulang. Seperti yang disampaikan Sahlberg (2014) dekade 1960-an, Finlandia secara umum meninggalkan banyak nilai-nilai lama, dan institusi-institusi tradisional, Finlandia mulai bertransformasi; yang paling terlihat adalah pelayanan publik – khususnya pendidikan dasar.

Akibat pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Sampai bulan Juni 2020, ekonomi Indonesia tumbuh di 2,97 persen, masih positif namun ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan yang biasanya di atas 5 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi, dapat diperkirakan angka putus sekolah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020 dapat melebihi 33% atau 14,9 juta dari 45,3 juta jumlah seluruh siswa Indonesia.

Pandemi covid-19, menjadi sejarah yang tidak terlupakan, selain ada pandemi influenza tahun 1918 yang tidak tercatat angka putus sekolah dengan pasti, kondisinya mirip dengan saat ini. Akhirnya, angka putus sekolah tidak sekedar catatan yang diwariskan, tetapi ada upaya untuk menanggulangi, bahkan menghapusnya.

SIMPULAN

Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia ini yang memberikan subsidi pulsa, dengan maksud untuk memperluas akses pembelajaran dalam jaringan. Berbagai kebijakan dalam pendidikan, selain subsidi pulsa untuk mengurangi dampak covid-19, dilakukan oleh negara Inggris dalam hal kesehatan mental. Di Brazil dilakukan penggantian kelas tatap muka berdasarkan jarak pembelajaran. Guru di Spanyol, diminta untuk menyiapkan konten dan menawarkan kelas online. Di Singapura, pelatihan diberikan kepada para guru tentang strategi pendidikan hingga pengajaran online. Pilihan kebijakan beragam, urgensi yang dibebankan oleh tantangan menyebar dengan cepat karena covid-19, menjadikannya penting untuk mengamati solusi dan strategi jangka pendek yang telah diterapkan oleh jaringan pendidikan di seluruh dunia.

Untuk mengurangi angka putus sekolah dampak pandemi covid-19, mustinya bukan sekedar subsidi pulsa, karena pilihan kebijakan beragam. Paling utama penyebab putus sekolah yaitu krisis ekonomi yang membelit keluarga, mendorong anak tidak melanjutkan sekolah. Saat ini Indonesia mengalami perlemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi, dapat diperkirakan angka putus sekolah pada berbagai

jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020 dapat melebihi 33% atau 14,9 juta dari 45,3 juta jumlah seluruh siswa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- APJII. (2019). *Mengawali Integritas Era Digital 2019* (33 Januari 2019). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Aristin, N. F. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/pg.v20i1.5009>
- Aucejo, E. M., French, J. F., Araya, M. P. U., & Zafar, B. (2020). The Impact of Covid-19 on Student Experiences and Expectations: Evidence from a Survey. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, Article w27392. <https://www.nber.org/papers/w27392>
- Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S. A., & Geven, K. (2020). *Simulating the Potential Impacts of Covid-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A Set of Global Estimates*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9284>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Hasil Akreditasi Menurut Jenjang Sekolah dan Peringkat Akreditasi 2015*. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1421/1/hasil-akreditasi-menurut-jenjang-sekolah-dan-peringkat-akreditasi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indikator Pendidikan*. <https://www.bps.go.id/publication/2016/06/29/7aa1e8f93b4148234a9b4bc3/statistik-indonesia-2016.html>
- Bernstein, L. (2019). *New Global Survey Offers Snapshot of Technology in the Classroom in 2019 | EdTech Magazine*. <https://edtechmagazine.com/k12/article/2019/02/new-global-survey-offers-snapshot-technology-classroom-2019>
- Dewi, N. A. K., Drs. Anjuman Zuhri, M. P., & Drs. I Ketut Dunia, M. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.1898>
- Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. (2020). *Covid-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime*. 9.
- Dunn, C. G., Kenney, E., Fleischhacker, S. E., & Bleich, S. N. (2020). Feeding Low-Income Children during the Covid-19 Pandemic. *New England Journal of Medicine*, 382(18), e40. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2005638>
- Gates, B. (2020). Responding to Covid-19—A Once-in-a-Century Pandemic? *New England Journal of Medicine*, 382(18), 1677–1679. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2003762>
- Kurniasari, F., Jusuf, E., & Gunardi, A. (2018). The readiness of Indonesian toward MOOC system. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3), 1631–1636. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.15431>
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (Covid-19): A review. *International Journal of Surgery (London, England)*, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>
- Nielsen, H. D. (1998). Reforms to Teacher Education in Indonesia: Does More Mean Better? *Asia Pacific Journal of Education*, 18(2), 9–25. <https://doi.org/10.1080/0218879980180203>

- Ouma, D. H., Ting, Z., & Pesha, J. C. (2017). Analysis of the Socio-Economic Factors That Contribute to Children School Dropout in Artisanal Small-Scale Gold Mining Communities of Tanzania. *Journal of Education and Practice*, 8(14), 71–78.
- Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. *New England Journal of Medicine*, 383(6), 510–512. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017>
- Riyadiningsih, H., & Astuti, R. P. (2013). Kondisi Psikologis Anak Putus Sekolah. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1), Article 1. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/214>
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2019). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Di Kota Tangerang. *Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 18(2), 98–111. <https://doi.org/10.33592/pelita.v18i2.45>
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Sah Media.
- Sahlberg, P. (2014). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*, Second Edition. Teachers College Press.
- Save Our Education: Protect every child's right to learn in the COVID-19 response and recovery*. (2020). <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-our-education-protect-every-childs-right-learn-covid-19-response-and-recovery>
- Speedtest Global Index – Monthly comparisons of internet speeds from around the world*. (2020). Speedtest Global Index. <https://www.speedtest.net/global-index>
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Suprastowo, P. (2014). Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 149–172. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.135>
- Swedish actions on education in response to the corona pandemic*. (2020, June 29). Cedefop. <https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/swedish-actions-education-response-corona-pandemic>
- UNESCO. (2020, March 26). *UNESCO rallies international organizations, civil society and private sector partners in a broad Coalition to ensure #LearningNeverStops*. UNESCO. <https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-private-sector-partners-broad>
- UNICEF. (2020). *Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in Schools* (Vol. 1–UNICEF/UNI220408/Pacific). Education in Emergencies UNICEF New York.
- Wibowo, Priyanto, Magdalia Alfian, Tri Wahyuning M.Irsyam, Kresno Brahmantyo, Harto Yuwono, Tubagus Arie Rukmantara, & Syefri Luwis. (2009). *Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*. Kerjasama antara Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Unicef Jakarta dan Komnas FBPI.
- World Bank. (2019). *World Development Report 2019—Consultation* [Text/HTML]. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019/brief/world-development-report-2019-consultation>
- World Bank. (2020). *The impact of COVID-19 on education in Brazil* [Text/HTML]. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/events/2020/04/29/the-impact-of-covid-19-on-education-in-brazil>